

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan melalui aplikasi SimdatIn	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melalui aplikasi SimdatIn	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui aplikasi SimdatIn	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Kekayaan intelektual melalui aplikasi SimdatIn	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Kekayaan Intelektual	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>					
9	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemendukham	Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Unit Eselon I
		Triwulan	Evaluasi Triwulanan oleh Itjen		
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan	Output / Data Dukung dari Itjen: Laporan APIP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
10	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK)	Inspektorat Jenderal Seluruh UKE I Kantor Wilayah Seluruh UPT
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023		
		Triwulan II	a. Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal	Output / Data Dukung dari Itjen:	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK	1. Matriks Tindak Lanjut hasil Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2023  2. Laporan Pelaksanaan Penguatan/ Sosialisasi atas Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024  3. Laporan KPK tentang hasil SPI Kemenkumham Tahun 2024	
		Triwulan III	Hasil survei		



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

Tanggal : 11 Januari 2024

**RENCANA AKSI BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
<b>DITJEN PP</b>					
1	Belum terdapat Riwayat Pendokumentasian Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Menyusun Jawaban Termohon di MA dan Keterangan presiden di MK	Januari	Menetapkan SK Tim Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	SK Tim Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
		Februari	Melakukan Inventarisasi Target yang akan dicapai B04-B06	Inventarisasi Target yang akan dicapai B04-B06	
		Maret-April	Persiapan Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Draf Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	
		Mei-Desember	Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	
2	Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan dalam	Januari	Menetapkan SK Aplikasi e-pengundangan	SK Aplikasi e-pengundangan	Direktur Pengundangan,

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan	Februari	Persiapan Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Laporan Persiapan Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Penerjemahan, dan Publikasi
Maret	Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Laporan Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan			
April	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 10% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi E-pengundangan			
Mei	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 20% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi E-pengundangan			
Juni	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 30% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi E-pengundangan			
Juli	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 40% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi E-pengundangan			

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 50% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		September	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 60% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Oktober	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 70% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		November	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 80% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Desember	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan dan Rencana Pembangunan Aplikasi Tahun2025	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan	
3	Masih rendahnya peringkat pencarian Laman Resmi Ditjen PP yang berisi database Perundang-undangan ( <a href="http://www.peraturan.go.id">www.peraturan.go.id</a> )	Januari	Menetapkan SK Tim Pencarian website peraturan.go.id di mesin pencari (google)	SK Tim Pencarian website peraturan.go.id di mesin pencari (google)	Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi
		Februari-Juni	Melakukan update Peraturan Perundang-undangan di website peraturan.go.id	Screenshot Ranking website	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli	Melakukan evaluasi Semester I Terhadap update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	Laporan Evaluasi update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	
		Agustus- November	Melakukan update Peraturan Perundang-undangan di website peraturan.go.id	Screenshot Ranking website	
		Desember	Melakukan evaluasi Semester II Terhadap update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	Laporan Evaluasi update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	
4	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Januari	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Februari	Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	<p>Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan:</p> <p>a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi.</p> <p>b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi</p>	



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Maret- November	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPDDAH)	Laporan kegiatan yang melampirkan: a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa: Raperda 1) Surat Permohonan Pengharmonisasian; 2) Penjelasan/Keterangan 3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda 5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyalakan pembentukan rancangan di luar Propemperda. Raperkada 1. Surat Permohonan Pengharmonisasian 2. Penjelasan/Keterangan 3. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa 4. SK Kepala Daerah	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Propemperkada beserta daftar lampiran Propemperkada atau SK Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperkada, b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir, notula dan dokumentasi</p>	
		Desember	<p>Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah</p>	<p>Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah, Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Pusat	Januari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM)</li> <li>2. Pembentukan Tim Penyusunan Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Pembentukan Tim Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi PRISMA</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Kerja Sama HAM</li> <li>2. Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM</li> <li>3. Direktorat Pelayanan Komunikasi HAM</li> <li>4. Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi HAM</li> <li>5. Direktorat Instrumen HAM</li> </ol>
		Februari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat penyusunan draft Rancangan Peraturan Menkumham tentang tata kerja GTN dan GTD BHAM</li> <li>2. Penyusunan Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Penyusunan Modul Pengembangan Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draft Rancangan Peraturan Menkumham tentang tata kerja GTN BHAM dan GTD BHAM</li> <li>2. Draft Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Draft SOP</li> <li>4. Draft Modul</li> </ol>	
		Maret	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Penajaman Aksi Bisnis dan HAM</li> <li>2. Uji Coba Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Reviu SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Uji Coba Modul Pengembangan Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Penajaman Aksi Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan Uji Coba Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Laporan Reviu</li> <li>4. Laporan Uji Coba Modul</li> </ol>	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Kesekretariatan Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Rapat Kesekretariatan Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.</li> </ol>	
		Mei	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.</li> </ol>	
		Juni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM</li> <li>4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.</li> </ol>	
		Juli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)</li> </ol>	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	1.a. Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan dan pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 1. b. Pembentukan Tim Helpdesk BHAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	1.a. Surat Koordinasi ke Kementerian/ Lembaga/Daerah tentang pelaksanaan dan pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 1. b. SK Tim Helpdesk BHAM 2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	
		September	1. Persiapan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	1. Surat Koordinasi ke GTN BHAM terkait Persiapan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	
		Oktober	1. Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2.a. Penyusunan Tim Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM 2. b. Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	1. Laporan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2.a. SK Tim 2. b. Laporan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	
		November	1.a. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Bisnis dan HAM 1.b. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM oleh Tim Helpdesk 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	1.a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Bisnis dan HAM 1.b. Laporan Pelaksanaan 2. Laporan Pelaksanaan Monev	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Desember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Tahunan Aksi Bisnis Dan HAM Ke Presiden</li> <li>2. Penyusunan Laporan Implementasi Stranas BHAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Tahunan Aksi Bisnis Dan HAM Ke Presiden</li> <li>2. Laporan Implementasi</li> </ol>	
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Januari	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM	Kadiv Yankum (Bidang HAM)
Februari	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM	Draft SK GTD BHAM			
Maret	Pengukuhan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	SK GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023			
April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM			
Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM			
Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM			
Juli	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.a. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>1. b. Laporan pendampingan</li> </ol>			
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan pendampingan</li> </ol>			
September	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM</li> <li>2. Laporan pendampingan</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan</li> </ol>			



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM		
		Oktober	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		November	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		Desember	1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	1. Laporan Monev dan Tindak Lanjut serta Implementasi Aksi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	
<b>BPHN</b>					
1	1. Belum adanya pengaturan teknis mengenai tata cara melakukan pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi di lingkungan	Maret	1. Membentuk Tim Kerja 2. Melaksanakan Rapat Penyusunan dan Pembahasan Awal	1. SK Pokja 2. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 3. Daftar Inventansi Permasalahan	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Pemerintah serta tindak lanjut hasilnya, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95B ayat (2) dan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022</p> <p>2. Selain itu, belum adanya metode/tools dalam melakukan pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang</p>	Juni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Draft RPermen tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>2. Melaksanakan Pembahasan RPermen dengan Narasumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi.</li> <li>2. Materi Narasumber</li> <li>3. SK Narasumber</li> <li>4. Draft RPermen</li> </ol>	
		September	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Pembahasan Draft Permen dengan Pemangku Kepentingan</li> <li>2. Penyusunan Draft Peraturan Menteri dengan pengayaan materi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi</li> <li>2. Draft RPermen hasil pembahasan dengan pemangku Kepentingan</li> </ol>	
		November	Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Menteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi.</li> <li>2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidaksiapan K/L untuk memenuhi syarat teknis pengajuan RUU dalam Prolegnas Prioritas</li> <li>2. Kurangnya kajian yang mendalam suatu RUU yang diajukan oleh K/L pemrakarsa</li> </ol>	Maret	Menginventarisasi dan menyusun konsep awal Prolegnas Jangka Menengah 2025 - 2029	Konsep inventarisasi RUU dalam Prolegnas	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
		Juni	Melaksanakan konsultasi publik dan lokakarya Prolegnas Jangka Menengah dalam rangka menjangkau aspirasi publik	Laporan hasil konsultasi publik dan lokakarya prolegnas serta rekomendasi hasil penjangkauan aspirasi publik	
		September	Melaksanakan koordinasi Prolegnas dengan Kementerian/ Lembaga dan/atau Baleg DPR sekaligus menyampaikan hasil konsultasi publik rancangan Prolegnas	Laporan hasil koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil penjangkauan aspirasi publik dengan K/L mengenai usulan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah	
		Desember	Menyampaikan Usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 di lingkungan pemerintah dari Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM	Surat Penyampaian Usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 di lingkungan pemerintah dari Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.</p>	April	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi data Kebutuhan PBH di setiap Kab/Kota</li> <li>2. Penunjukkan Panitia dan Pokja. serta pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kebutuhan PBH di setiap Kabupaten/Kota yang ditelaah oleh BPHN sesuai dengan hasil evaluasi atas persebaran PBH eksisting</li> <li>2. SK Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi</li> <li>2. SK Tim Pokja Pusat Verifikasi dan Akreditasi</li> <li>3. Pengumuman Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi</li> </ol>	Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		Desember	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
	<p>Masih sedikitnya Perguruan Tinggi yang mempunyai website jdih dan terintegrasi dengan portal website jdih</p>	Februari	Penjajakan Kerja Sama	Surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait Permohonan Kerja Sama	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
		Maret	Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ( <i>Brainstorming</i> )	Undangan, Absensi, Notula, dan Gambar/foto (UANG)	
		Juni	Rapat pembahasan draft dan kesepakatan para pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undangan, Absensi, Notula, dan Gambar/foto (UANG)</li> <li>2. Draft awal Perjanjian Kerja Sama</li> </ol>	
		Agustus	Finalisasi materi Perjanjian Kerja Sama yang sudah disetujui kedua belah Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (TNDE)</li> <li>2. Draft hasil kesepakatan Perjanjian Kerja Sama</li> </ol>	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		November	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
2	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampalan Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan di setiap wilayah	1. Surat undangan rapat (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah	KADIV YANKUM
Juni	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner Indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	1. SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)			
September	1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi)			
Desember	Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimasing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	Laporan akhir capaian kinerja			

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksanaannya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH.</p> <p>Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81,7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.</p>	<p>Junli</p>	<p>25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum</p>	<p>1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi</p>	<p>KADIV YANKUM</p>
<p>September</p>	<p>50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum</p>	<p>1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
<p>Desember</p>	<p>65% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum</p>	<p>1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi</p>			
	<p>Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH</p>	<p>Maret</p>	<p>Perunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum</p>	<p>SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi</p>	<p>KADIV YANKUM</p>

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dan 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.</p>	Juni	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
		Maret	Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i>	Laporan Pelaksanaan sosialisasi	KADIV YANKUM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.</p> <p>Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian</p>	Juni	Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i>	Usulan peserta <i>Paralegal Academy</i>	



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>perkara di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya, dan diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta konflik yang terjadi. Kepala desa/lurah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa/kelurahan, memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya. Hal ini juga sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban Masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa.</p>				



NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Peran Lurah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan keterlibatan umum.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diberikan penguatan kompetensi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal untuk melaksanakan tugas menjaga ketentraman dan keterlibatan serta lebih khususnya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa agar dapat mengurangi perselisihan paham antara penduduk desa yang akan berujung pada proses hukum litigasi yang Panjang dan rumit melalui apresiasi Paralegal Justice Award.</p>				

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Januari - Desember	Pengembangan sistem aplikasi Fidusia yang dapat melakukan filter atas obyek berserial number yang telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga tidak terjadi Fidusia Ulang/Ganda	Pengembangan Aplikasi Fidusia yang dapat mengakomodir: 1. Fidusia Ganda; 2. History pendaftaran fidusia sampai dengan Roya; 3. Pop-Up notification kepada akun notaris	Ditjen AHU
		Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Januari - Desember	Koordinasi dengan OJK selaku Pengawas lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan untuk data fidusia dan roya	Laporan hasil rapat koordinasi dengan OJK dan rekomendasi dari Ditjen AHU untuk OJK agar membuat kebijakan terhadap kewajiban penghapusan jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan	Ditjen AHU
2	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Ditjen AHU dan Kadiv Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Januari - Mei	Penyusunan Kebijakan serta dokumen Proses Bisnis Migrasi dan Sinkronisasi Data	Dokumen Kebijakan dan Dokumen Proses Bisnis Migrasi dan Sinkronisasi Data	Ditjen AHU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
<b>DITJEN KI</b>					
1	Belum adanya petunjuk atau peta jalan IG yang mengakibatkan rendahnya permohonan IG	Maret	Forum IG Nasional	Penandatanganan MOU, PKS dan Terbentuknya Gugus Tugas IG	Direktorat Merek Indikasi Geografis dan Dit KSE
		April	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Draft Action Plan	Direktorat Merek Indikasi Geografis
		Mei	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Draft Action Plan	
		Juni	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Pengesahan Action Plan IG	
		Juli s.d November	Observasi Lapangan	peningkatan kompetensi Tim Gugus Tugas dalam memahami kondisi di Lapangan	
		Juli s.d Desember	penyusunan roadmap dengan melibatkan konsultan dan K/L terkait. penguatan peran serta akademisi atau universitas, komunitas atau masyarakat dan media	- draft roadmap dan finalisasi roadmap IG - pengesahan roadmap	
		Desember	evaluasi dan monitoring dan rencana tindak lanjut 2025	laporan hasil evaluasi dan monitoring	
	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah</li> <li>Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat</li> <li>Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Koordinasi</li> <li>Daftar inventarisasi produk IG</li> <li>Daftar pihak-pihak terkait</li> </ol>	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG	
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	
		Desember	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	
	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	pemahaman terkait merek kolektif	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Juli s.d Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif	
		Desember	Monitoring dan evaluasi	laporan money terhadap tindak lanjut di Tahun 2025	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Triwulan 1-2	1) Persiapan penjajakan dengan mitra forum Gugus Tugas IG; 2) Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	1. Tim Pusat: SK Bersama? SK Menkumham? 2. Tim Wilayah: SK Gubernur? SK Kakanwil?	- Direktur KSE - Pokja Kerja Sama Dalam Negeri - Pokja Layanan IG - Kakanwil
		Triwulan 1-3	1) Penyusunan Work Plan dari Gugus Tugas yang sudah terbentuk; 2) Sosialisasi dari poin Work Plan yang dibentuk (implementasi dari forum Gugus Tugas IG)	1) Dokumen Work Plan; 2) Laporan implementasi/sosialisasi	- Direktur MIG - Pokja Layanan IG
		Triwulan 4	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitorin dan Evaluasi	
		Indonesia IP Academy	Triwulan I	1) Pembentukan SK Menkumham tentang IP Academy; 2) Finalisasi Modul IP Academy	1) SK Menkumham tentang Pembentukan IP Academy; 2) Draft Final Modul IP Academy
	Triwulan II	1) Pelatihan Calon Pengejar atau Training of Trainers (ToT) Modul 3 dan 4; 2) Kegiatan Pelatihan Percontohan ( <i>Pilot Training</i> ) dengan pengawasan dari WIPO	1. Laporan Pelatihan Calon Pengajar atau Training of Trainers (ToT) Modul 3 dan 4; 2) Laporan Pelatihan Percontohan ( <i>Pilot Training</i> ) dengan pengawasan dari WIPO	Dit. KSE (Pak Idris & Pak Danang)	
	Triwulan III	1) Koordinasi terkait sarana dan prasarana IP Academy - website IP Academy - Perpustakaan Digital, 2) Finalisasi Business Plan IP Academy	1) Dokumen hasil laporan/nota dinas korespondensi terkait koordinasi sarana prasarana IP Academy; 2) Dokumen final Business Plan IP Academy	- Dit KSE - Dit TI KI - Selditjen KI	
	Triwulan IV	Sosialisasi Kurikulum KI dan Modul Penunjang Pelaksanaan Kurikulum KI	Laporan sosialisasi Kurikulum KI dan Modul Penunjang Pelaksanaan Kurikulum KI	Dit. KSE	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Terdapat kendala dalam formulasi kinerja terkait proses penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran HKI yang belum selesai di tahun - tahun sebelumnya	Januari	melakukan update manual IKU Dit. Sidik terkait mekanisme perhitungan kinerja penyelesaian aduan pelanggaran HKI	Dokumen update manual IKU Dit. Sidik	Dit. Penyidikan
		Januari-Desember	Penerapan perhitungan kinerja penyelesaian aduan pelanggaran HKI sesuai dengan update pada manual IKU	Laporan bulanan kinerja sesuai dengan manual IKU yang baru	
	1. Sistem penanganan aduan pelanggaran HKI saat ini belum difasilitasi fitur fitur seperti tanda tangan digital dan juga format berita acara sebagai salah satu 2. agar pengembangan sistem aduan di DJKI terintegrasi dengan APH yang lain	Januari	Pembuatan kebutuhan pengembangan sistem aduan dan penanganan pelanggaran HKI kepada Dit. TIKAYA	Nota Dinas kebutuhan pengembangan sistem	Dit. Penyidikan
	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dit. Penyidikan memerlukan koordinasi dan interaksi dengan APH yang lain sehingga memerlukan penambahan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi terkait penyidikan untuk melaksanakan tugas tugas tersebut	Januari	Pembuatan Nota dinas penambahan kebutuhan SDM di Dit. Sidik kepada Sekretariat DJKI	Nota dinas penambahan kebutuhan SDM di Dit. Sidik kepada Sekretariat DJKI	Dit. Penyidikan
	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens - Lokasi tempat - Pembagian anggaran	Kantor Wilayah Kemenkumham
		Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	